FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* BELANJA DAERAH PADA PROVINSI – PROVINSI DI SUMATERA

(Skripsi)

Oleh

RIA NANDA NINGSIH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

ABSTRAK

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* BELANJA DAERAH PADA PROVINSI – PROVINSI DI SUMATERA

Oleh

RIA NANDA NINGSIH

Bantuan transfer pemerintah pusat menyebabkan terjadinya perilaku asimetris yang disebut *flypaper effect*. *Flypaper effect* terjadi saat pemerintah daerah menggunakan transfer lebih besar dibandingkan pendapatan daerahnya. Penelitian ini menggunakan *Random effect model* dengan data dari 10 provinsi di Pulau Sumatera antara 2010-2019. Hasil penelitian membuktikan telah terjadinya fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah di provinsi-provinsi Sumatera, dan *flypaper effect* terbukti terjadi pada provinsi dengan PAD rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap dana yang ditransfer dari pemerintah pusat masih relatif tinggi.

Kata kunci : *Flypaper Effect*, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, *Unconditional Grant.*

ABSTRACT

THE FLYPAPER EFFECT PHENOMENON OF REGIONAL EXPENDITURE ON PROVINCES – PROVINCES IN SUMATRA

By

RIA NANDA NINGSIH

Central government transfer assistance causes the occurrence of asymmetric behavior called flypaper effect. Flypaper effect occurs when local governments use transfers greater than the revenue of the region. This study used Random effect model with data from 10 provinces in Sumatra Island between 2010-2019. The results prove that there has been a flypaper effect on regional spending in sumatra provinces, and flypaper effect is proven to occur in provinces with low PAD. Thus, it can be concluded that the level of regional dependence on funds transferred from the central government is still relatively high.

Keywords : Flypaper Effect, regional expenditure, Original Local Government Revenue, Unconditional Grant.

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* BELANJA DAERAH PADA PROVINSI – PROVINSI DI SUMATERA

Oleh

RIA NANDA NINGSIH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

Judul Skripsi	:	**FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* BELANJA DAERAH PADA PROVINSI – PROVINSI DI SUMATERA**
Nama Mahasiswa	:	Ria Nanda Ningsih
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1711021044**
Program Studi	:	**Ekonomi Pembangunan**
Fakultas	:	**Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Moneyzar Usman, S.E., M.Si
NIP. 19600621 198603 1 002

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Moneyzar Usman, S.E., M.Si.**

   Penguji I : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**

   Penguji II : **Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Juli 2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan bersungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini salah maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juli 2021

Penulis

RIA NANDA NINGSIH

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ria Nanda Ningsih dilahirkan di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 07 Maret 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suparmin dan Ibu Sumarsih.

Menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Kurnia Teluk Betung Utara pada tahun 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Kupang Kota, Bandar Lampung tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 16 Bandar Lampung pada tahun 2014, dan menyelesaikan pendidikan di SMKN 4 Bandar Lampung pada tahun 2017.

Penulis terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Lampung jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur SBMPTN 2017. Selama menjadi mahasiswa penulis ikut berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Pada tahun 2019, penulis melakukan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) di Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Museum Bank Indonesia. Pada tahun 2019, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I 2020 di Desa Bawang Sakti Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang sebagai bentuk dari pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan magang di PT. Pegadaian cabang Tanjung Karang Pusat.

MOTTO

“ Selalu berfikir positif, lakukan hal bermanfaat dan jangan memaksa dirimu menjadi apa yang orang lain mau. ”

“ Anda mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu. “

(Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan shalawat serta salam selalu tersanjung agungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kupersembahkan karya ini kepada :

Kedua orang tua ku Bapakku Suparmin dan Ibuku Sumarsih, terimakasih atas doa, kasih sayang dan dukungan selama ini yang telah diberikan dalam menjalankan segala hal dan selalu menemani dalam menempuh pendidikan.

Adikku Rivaldi Aji Saputra dan sepupu-sepupuku yang telah direpotkan selama menyelesaikan tugas akhir ini. Sahabat – sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu dan tentunya teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan angkatan 2017.

Dosen – dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan, nasihat, dan motivasi selama perkuliahan. Serta almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANCAWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarkatuh,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi.

Skripsi dengan judul "*Fenomena Flypaper Effect Belanja Daerah Pada Provinsi – Provinsi di Sumatera".* Penulis sadar dalam penyusunannya tidak terlepas dari peran dan bantuan berbagi pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan;
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan;
4. Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan pemikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku dosen penguji I yang telah menyediakan waktu serta kritik dan sarannya dalam proses penyelesaian skripsi;
6. Bapak Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku dosen penguji II yang telah menyediakan waktu dan masukannya dalam proses penyelesaian skripsi;
7. Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas pada seminar proposal dan hasil yang telah memberikan sarannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan saran selama perkuliahan;
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan;
10. Para staff administrasi FEB yang telah banyak membantu kelancaran proses skripsi ini;
11. Kepada orang tuaku, Bapak Suparmin dan Ibu Sumarsih. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga mencapai sarjana;
12. Adikku Rivaldi Aji Saputra yang telah memberikan doa dan semangatnya;
13. Sepupuku Sindy, Mira, Mba Tari, Mba Fera, dan Mas Handi yang menjadi tempat bertukar pikiran;
14. Sahabat sekolahku Febriana Mayasari, Fikra Nisa, Sharfina Anggraini, Widya Adinda dan yang lainnnya. Terima kasih atas dukungnya selama ini;

15. Sahabatku HMPJ, Annisa Luvita Ninky, Djerica Fitria Adinda, Exty Rika Wati, Ages Tiara, dan Bella Amalia Riezky yang telah memberikan semangat, tempat bertukar pikiran dan informasi selama ini;
16. Partner skripsiku Nia April Lita sekaligus teman seperbimbingan yang selalu menemani kemanapun selama menjalankan revisian hingga akhir;
17. Teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan semangatnya, doa serta dukungannya yang diberikan selama ini;

Akhir kata, penulis menyadari masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis harap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang khususnya peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian.

Bandar Lampung, 14 Juli 2021

Penulis,

Ria Nanda Ningsih

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

DAFTAR LAMPIRAN x

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian..... 12

II. TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Kajian Teori 13

1. Desentralisasi Fiskal..... 13

2. *Flypaper Effect*..... 14

2.1 *Fiscal Illusion* 15

2.2 *The Bureaucratic Model*..... 16

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah 16

3.1 Teori Mikro..... 17

3.2 Teori Makro 18

3.2.1 Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 18

3.2.2 Hukum Wagner..... 19

3.2.3 Teori Peacock dan Wiseman..... 19

4. Pendapatan Asli Daerah 22

5. Transfer Tanpa Syarat (*Unconditional Grant*) 25
5.1 Dana Alokasi Umum (DAU) 25
5.2 Dana Bagi Hasil (DBH)..... 26
B. Penelitian Terdahulu..... 27
C. Kerangka Pemikiran 30
D. Hipotesis 30

III. METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Sumber Data..... 31
B. Definisi Operasional Variabel..... 32
C. Metode Analisis..... 34
1. Analisis Deskriptif 34
2. Uji Asumsi Klasik 34
2.1 Uji Normalitas 35
2.2 Deteksi Multikolinieritas 35
3. Analisis Estimasi 36
3.1 Metode *Common Effect* (CEM) 37
3.2 Metode *Fixed Effect* (FEM)..... 37
3.3 Metode *Random Effect* (REM) 38
4. Pemilihan Metode Regresi..... 38
4.1 Uji *Chow*..... 39
4.2 Uji *Lagrange Multiplier (LM)* 39
4.3 Uji *Hausman* 40
5. Koefisien Determinasi (R^2) 41
6. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) 41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 43
A. Gambaran Umum Pulau Sumatera 43
B. Hasil Deskriptif 44
C. Uji Asumsi Klasik 45
1. Uji Normalitas 45
2. Deteksi Multikolinieritas 45
D. Hasil Regresi Panel 46

1. Hasil Pemilihan Metode 46
1.1 Uji *Chow* 46
1.2 Uji *Lagrange Multiplier (LM)* 46
1.3 Uji *Hausman* 47
2. Hasil Estimasi Regresi 47
3. Koefisien Determinasi (R^2) 48
E. Pembahasan Hasil Penelitian 49
1. Fenomena *Flypaper Effect* Belanja Daerah 49
2. *Flypaper Effect* Pada Provinsi Dengan PAD Rendah 51

V. KESIMPULAN DAN SARAN 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Alokasi Belanja Daerah di Pulau Sumatera 4
2. Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah 9
3. Kontribusi UCG Terhadap Belanja Daerah 9
4. Penelitian Sebelumnya 27
5. Variabel dalam Penelitian 32
6. Kategori Provinsi Berdasarkan Rasio DDF 42
7. Statistik Deskriptif..... 44
8. Uji *Jarque Bera* 45
9. Deteksi Multikolinieritas 45
10. Uji *Chow* 46
11. Uji *Lagrange Multiplier (LM)* 46
12. Uji *Hausman* 47
13. Perbedaan Intersep Provinsi-Provinsi di Sumatera 48
14. Provinsi Berdasarkan Rasio DDF 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Perbedaan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Desentralisasi 3
2. Sumber – Sumber Dana Perimbangan 5
3. Skema kerangka pemikiran..... 30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Data Belanja Daerah (G) pada provinsi-provinsi di Sumatera
2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada provinsi-provinsi di Sumatera
3. Data *Unconditional Grant* (UCG) pada provinsi-provinsi di Sumatera
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Asumsi Klasik
    a. Uji Normalitas
    b. Deteksi Multikolinieritas
6. Uji *Chow*
7. Uji *Lagrange Multiplier (LM)*
8. Uji *Hausman*
9. Uji *Common Effect Model (CEM)*
10. Uji *Fixed Effect Model* (FEM)
11. Uji *Random Effect Model* (REM)
12. Provinsi Dengan PAD Rendah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besar penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk negara. Pengeluaran pemerintah selalu mengikuti perkembangan zaman, semakin berkembang suatu zaman maka akan meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan yang dilihat dari aspek kuantitas dan kualitasnya. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang tersebut sebagai wujud dari desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah disebabkan oleh beberapa hal, meliputi perkembangan masyarakat, kondisi geografis, struktur sosial dan budaya lokal yang berbeda disetiap daerah di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut menyebabkan pemerintah pusat sulit untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di setiap provinsi. Sehingga, diharapkan dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut mampu

digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah dengan cangkupan yang lebih kecil untuk mengali segala potensi dan keanekaragaman yang dimiliki guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan peran masyarakat untuk mencapai kemandirian daerah.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2001 dan sudah memberikan banyak perubahan di setiap daerah. Setiap daerah diharuskan untuk belajar dalam mengelola dan menjalankan urusan pemerintahannya sendiri. Menjalankan desentralisasi di Indonesia seringkali mengalami berbagai kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah terutama dalam hal keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), finansial dan minimnya potensi daerah. Akibatnya, membuat tujuan desentralisasi seringkali tidak sejalan dengan yang diharapkan. Menurut Halim (2004), menjelaskan ciri utama suatu daerah mampu menjalankan desentralisasi, yaitu (1) daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, menggelola dan menggunakan keuangannya sendiri, dan (2) ketergantungan terhadap bantuan dana pusat harus seminimal mungkin agar peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar dan pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar. Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah pusat telah memberikan bantuan transfer kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan selain pendapatan yang dimiliki daerah itu sendiri dalam menjalankan kegiatannya. Namun, hal ini mengubah besaran belanja daerah setelah kebijakan desentralisasi dijalankan.

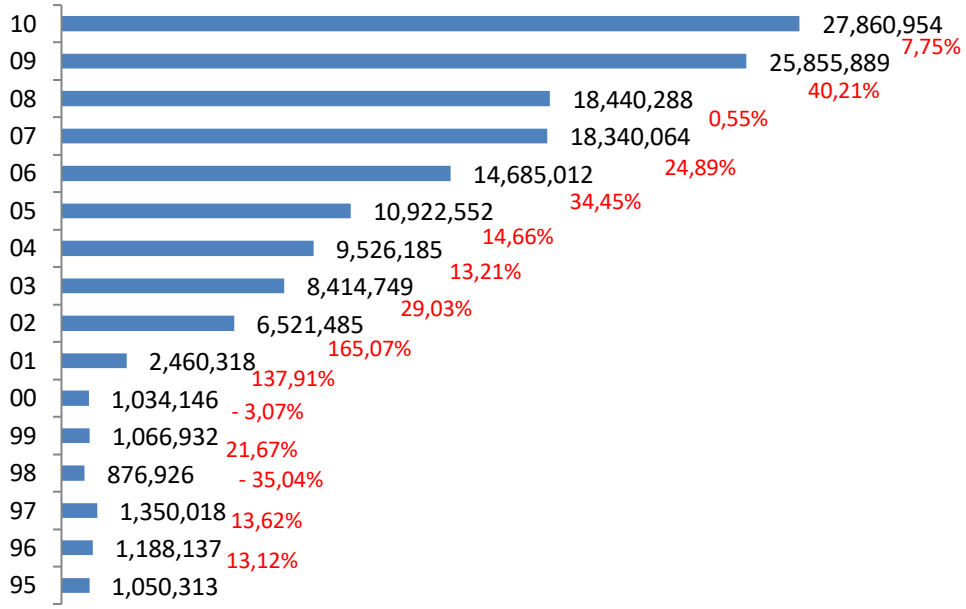

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), data diolah.

Gambar 1. Perbedaan belanja daerah sebelum dan sesudah kebijakan desentralisasi di Pulau Sumatera tahun 1995-2010.

Berdasarkan Gambar 1, menunjukkan tren belanja daerah dari tahun 1995 – 2000 di Pulau Sumatera cenderung mengalami fluktuasi. Tahun 2001 terjadi peningkatan belanja daerah yang tinggi sebesar 137,91% saat kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia dan terus mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dana transfer pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah sangat berdampak pada kenaikkan belanja daerah di Pulau Sumatera.

Disisi lain, transfer yang diberikan permerintah pusat kepada daerah merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah pusat untuk mencapai suatu kemandirian daerah. Tujuan dari transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah. Dana

yang dimiliki daerah haruslah lebih banyak digunakan untuk sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap PAD. Hal ini diharapkan agar meningkatnya kapasitas fiskal daerah, yang menyebabkan tanggungan pemerintah untuk memberikan dana transfer relatif berkurang. Dengan melihat alokasi belanja dari postur APBD maka akan memberikan informasi mengenai dana yang digunakan pemerintah daerah, apakah lebih banyak dialokasikan untuk sektor produktif ataukah pada sektor konsumtif.

Tabel 1. Alokasi Belanja Daerah di Pulau Sumatera

Alokasi Belanja	**Tahun**			
	2015	**2016**	**2017**	**2018**
Belanja Tidak Langsung	**28,848,246**	**32,472,131**	**38,470,210**	**37,797,228**
Belanja Pegawai	6,724,370	6,890,652	16,486,280	16,859,120
Belanja Bunga	-	-	-	1,784
Belanja Subsidi	-	-	-	2,352
Belanja Hibah	9,027,750	11,923,702	9,976,687	11,069,719
Belanja Bantuan Sosial	316,477	252,748	261,696	242,351
Belanja Bagi Hasil	6,913,947	8,191,809	7,881,917	8,100,850
Belanja Bantuan Keuangan	5,859,237	5,193,892	4,445,243	1,461,329
Pengeluaran Tidak Terduga	6,443	19,308	39,198	59,699
Belanja Langsung	**23,198,232**	**22,975,632**	**28,585,161**	**30,253,541**
Belanja Pegawai	1,461,038	1,441,547	1,833,478	1,443,701
Belanja Barang dan Jasa	10,866,917	11,741,489	14,616,652	16,988,534
Belanja Modal	9,515,487	9,792,587	12,135,024	11,505,898

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa alokasi belanja daerah di Pulau Sumatera dari tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja barang dan jasa dibandingkan dengan belanja modal. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang tinggi pada pengeluaran belanja pegawai tidak langsung dari Rp 6.890.652,- meningkat menjadi Rp. 16,486.280,-. Hal ini menandakan terjadi lonjakan belanja daerah untuk membayar gaji pegawai, membeli barang yang memiliki manfaat kurang dari satu tahun dan digunakan untuk membayar jasa, yang seharusnya alokasi belanja daerah dapat lebih banyak dimanfaatkan untuk belanja modal.

Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan merupakan pendanaan kepada daerah bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

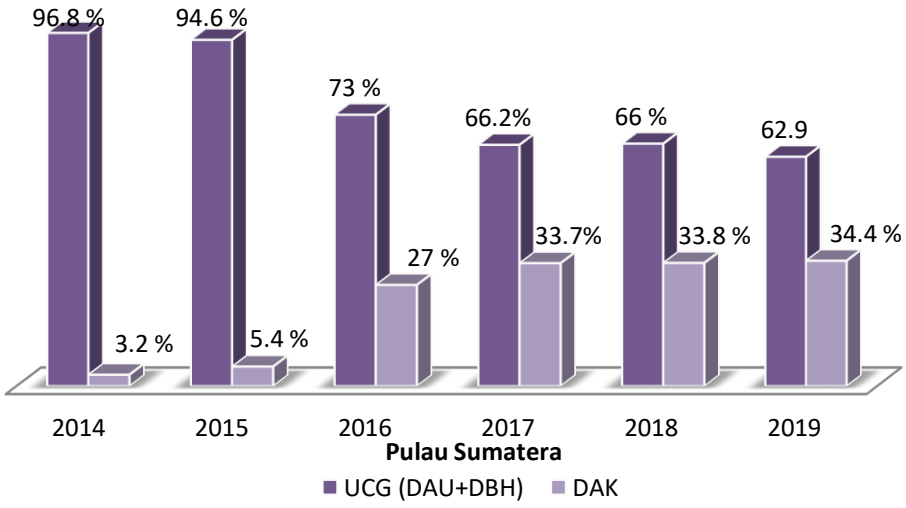

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah.

Gambar 2. Sumber-Sumber Dana Perimbangan.

Berdasarkan Gambar 2, diketahui sumber terbesar dana perimbangan berasal dari *Unconditional Grant* (UCG) atau disebut transfer tanpa syarat. persentase UCG terhadap total pendapatan selama periode 2014 – 2019 melebihi 50% dibandingkan Persentase *Conditional Grant* (CG) terhadap total pendapatan. Secara umum yang digolongkan kedalam *unconditional grant* atau transfer tanpa syarat adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Transfer tanpa syarat (*unconditional grant*) ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah, sehingga setiap daerah mampu melaksanakan urusan daerahnya sendiri pada tingkat yang layak. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) digolongkan ke dalam bentuk *conditional grant* atau disebut dengan transfer bersyarat. Transfer bersyarat *(conditional grant)* ditujukan untuk keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah (BPPK).

Terlepas dari sistem pemerintahannya, transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara dan sudah menjadi ciri dari hubungan keuangan antara daerah dan pusat. Selain menerima transfer pusat, pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengali sumber-sumber baru dan meningkatkan sarana prasana yang ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengali potensinya serta menjadi alat ukur kemandirian suatu daerah dalam menjalankan kegiatannya. Peningkatan pendapatan akan selaras dengan peningkatan

pengeluaran, dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka belanja daerah juga akan meningkat. Sehingga, pemerintah daerah perlu secara optimal mengalokasikan pada sektor-sektor yang tepat.

Pada penelitian terdahulu, menunjukkan respon pemerintah daerah berbeda antara transfer pusat dan pendapatan asli daerahnya. Pada saat pemerintah daerah merespon pengeluaran daerah dengan lebih banyak mengandalkan atau menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan dengan menggunakan kemampuan daerahnya sendiri yang berasal dari PAD, maka kondisi tersebut disebut *flypaper effect* (Maimunah, 2006). *Flypaper effect* pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an oleh James Henderson (1968) dan Edward Gramlich (1969). Mereka mencari penjelasan tentang bagaimana demografi dan ekonomi berkorelasi dengan anggaran pemerintah. Hasilnya cukup tak terduga, satu dolar tambahan dari pendapatan pribadi meningkat pengeluaran sebesar $0,02 – $0,05, tetapi satu dolar tambahan dari transfer pemerintah meningkatkan pengeluaran sebesar $0,3 - $1. Ketika mereka mempresentasikan hasilnya, seorang rekan bernama Arthur Okun menciptakan frasa terkenal akibat efek pemerintah pada pengeluaran yaitu *flypaper*, *"money sticks where it hits*" (Inman, 2008).

Flypaper effect memberikan implikasi bahwa transfer menstimulus belanja daerah yang lebih besar dari pada peningkatan pendapatan daerah (Turnbull, 1998). Maimunah (2006), menyatakan syarat terjadinya *flypaper effect* adalah; 1) apabila nilai koefisien DAU terhadap BD > nilai

koefisien PAD terhadap BD dan keduanya signifikan, atau 2) PAD tidak signifikan terhadap BD, maka dapat disimpulkan terjadi *Flypaper Effect*. Kusumadewi (2007), menyatakan bahwa untuk mengetahui terjadinya *flypaper effect* maka *P Value* DAU harus lebih signifikan (lebih kecil) daripada *P Value* PAD, atau t-statistik PAD tidak signifikan. Menurut Tresch (2002), dapat di fungsikan jika $b_1 > b_2$ berarti $\frac{b1}{b2} > 1$, maka terjadi *flypaper Effect.* Serta tren belanja daerah cenderung meningkat setelah dilaksanakan kebijakan tersebut, dan belanja daerah lebih banyak dialokasikan pada sektor- sektor yang tidak produktif.

Permasalahan yang sering muncul saat ini yang menyebabkan terjadinya *flypaper effect* di suatu daerah adalah pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatan asli daerahnya dibandingkan dengan penggunaan transfer pusat. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan rendah akan mendapatkan dana transfer dalam jumlah relatif besar, sebaliknya daerah dengan kemampuan keuangan tinggi akan mendapatkan dana transfer dalam jumlah kecil. ketika transfer pusat yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya transfer pusat yang diperoleh relatif tetap (Rahmatul, 2016). Dengan arti lain pemberian bantuan dana seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian, justru direspon berbeda oleh daerah. Daerah menjadi tidak mandiri, justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat (Ndadari dan Adi, 2006). Ketergantungan daerah terhadap pusat dalam mengurus daerahnya atau lebih banyak menggunakan kemampuan daerah dalam mengalokasikan belanja daerah pada provinsi di Sumatera. Hal ini dapat

dilihat dari kontribusi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan *Unconditional Grant* (UCG) terhadap belanja daerah di Sumatera yang akan digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah

Provinsi	PAD (%)					Rata-rata	Rata-rata Total
	2015	2016	2017	2018	2019		
Aceh	16.25	17.00	16.46	19.17	16.91	**17.2**	**34%**
Sumatera Utara	61.36	52.29	42.24	44.88	56.43	**51.4**	
Sumatera Barat	46.66	43.61	37.05	36.30	38.03	**40.3**	
Riau	44.80	35.62	36.57	42.97	41.53	**40.3**	
Jambi	36.23	36.19	38.24	39.46	31.60	**36.4**	
Sumatera Selatan	48.83	51.31	47.30	44.43	34.48	**45.3**	
Bengkulu	30.73	36.04	28.06	29.27	38.10	**32.4**	
Lampung	47.00	43.25	39.58	37.99	48.51	**43.3**	
Bangka Belitung	30.58	27.74	30.09	35.97	29.43	**30.8**	
Kep. Riau	38.85	37.36	36.04	35.67	34.27	**36.4**	

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Unconditional Grant (UCG) diberikan kepada pemerintah daerah dengan ciri utama yaitu daerah memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan -pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan yang menjadi prioritas daerahnya (Iskandar, 2012). Dengan kontribusi UCG terhadap belanja daerah, sebagai berikut :

Tabel 3. Kontribusi UCG Terhadap Belanja Daerah

Provinsi	UCG (%)					Rata-rata	Rata – rata Total
	2015	2016	2017	2018	2019		
Aceh	12.29	11.90	16.73	18.30	15.94	**15**	**33.3**
Sumatera Utara	18.51	22.32	22.93	25.02	23.03	**22.4**	
Sumatera Barat	33.02	31.00	37.62	34.25	33.31	**33.8**	
Riau	32.02	27.52	31.90	37.63	37.09	**33.2**	

Jambi	39.73	39.97	43.27	43.02	37.93	**40.8**
Sumatera Selatan	43.55	47.52	50.01	42.08	35.62	**43.8**
Bengkulu	50.17	56.57	47.53	45.91	44.27	**49**
Lampung	26.55	27.52	30.23	27.50	28.98	**28.2**
Bangka Belitung	58.08	50.65	46.68	52.19	45.07	**50.5**
Kepulauan Riau	46.20	49.91	52.23	49.33	52.73	**50.1**

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah.

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah lebih besar dari rata-rata kontribusi *Unconditional Grant* (UCG) terhadap belanja daerah atau sebesar 34% > 33,3%. Menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah lebih besar digunakan untuk belanja daerah dibandingkan dengan transfer pusat dengan selisih perbedaan 0,7 %. Dengan kata lain, penggunaan transfer pusat semakin berkurang selama periode tahun 2015-2019 dan juga akan berdampak pada tingkat kemandirian daerah di Pulau Sumatera.

Penelitian ini menggunakan wilayah Sumatera menjadi wilayah penelitian, dikarenakan Pulau Sumatera memiliki sepuluh provinsi yang meliputi; Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Pulau Sumatera tentunya memiliki perbedaan dengan pulau lainnnya terutama dengan Pulau Jawa. Dibandingkan dengan Pulau Jawa, Sumatera memiliki penerimaan daerah yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh masih bergantungnya daerah pada sumber daya alam yang ada, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, sebagai faktor pendorong keberhasilan suatu daerah. Jika tidak terbukti terjadi *flypaper effect* maka daerah tersebut sudah memiliki kemandirian daerah yang

tinggi, sebaliknya jika terbukti terjadi *flypaper effect* maka pemerintah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengindikasi terjadinya *flypaper effect* di Pulau Sumatera dan untuk mengetahui *flypaper effect* terjadi pada provinsi dengan PAD rendah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *flypaper effect* dengan judul "**Fenomena *Flypaper Effect* Belanja Daerah Pada Provinsi – Provinsi di Sumatera".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang terjadinya masalah tersebut, dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah :

1. Apakah terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah dalam kurun waktu 2010 - 2019 ?
2. Apakah *flypaper effect* terjadi pada provinsi dengan PAD rendah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang terjadi, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Membuktikan apakah terdapat fenomena *flypaper effect* terhadap belanja daerah pada provinsi-provinsi di Sumatera.
2. Membuktikan *flypaper effect* terjadi pada Provinsi dengan PAD rendah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah akan pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada sumber eksternal yang diberikan pemerintah pusat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan pembanding dengan hasil penelitian lainnya, dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai topik- topik yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dilaksanakan pada era reformasi. Dalam prosesnya, regulasi yang ada sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Pada sistem pemerintahan desentralisasi diwujudkan dengan memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan oleh pemerintah pusat kini dapat diputuskan di tingkat pemerintahan daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan kemandirian bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan konsekuensi, daerah menerima pelimpahan kewenangan dari berbagai bidang, kecuali bidang yang berhubungan dengan luar negeri, keamanan, pertahanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan wewenang ini diikuti dengan bantuan pendanaan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa

(TKDD) yang diberikan sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemandirian daerah.

2. *Flypaper Effect*

Flypaper effect pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an oleh James Henderson (1968) dan Edward Gramlich (1969). Mereka mencari penjelasan tentang bagaimana demografi dan ekonomi berkorelasi dengan anggaran pemerintah. Hasilnya cukup tak terduga, satu dolar tambahan dari pendapatan pribadi meningkat pengeluaran sebesar $0,02 – $0,05, tetapi satu dolar tambahan dari transfer pemerintah meningkatkan pengeluaran sebesar $0,3 - $1. Ketika mereka mempresentasikan hasilnya, seorang rekan bernama Arthur Okun menciptakan frasa terkenal akibat efek pemerintah pada pengeluaran yaitu *flypaper*, *"money sticks where it hits*" (Inman, 2008).

Flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon pengeluaran pemerintah dengan lebih banyak menggunakan dana transfer yang berasal pemerintah pusat dari pada menggunakan kemampuannya sendiri, diproksikan dengan PAD (Maimunah, 2006). Sementara itu, Gorodnichenko (2011) berpendapat bahwa fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu peningkatan pajak daerah dan belanja pemerintah yang berlebihan, dan mengarah pada elastisitas belanja terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas belanja terhadap pendapatan pajak. *Flypaper effect* dianggap sebagai suatu penyimpangan dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap

sebagai tambahan pendapatan masyarakat, sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Flypaper effect* memberikan implikasi bahwa transfer menstimulus belanja daerah yang lebih besar dari pada peningkatan pendapatan daerah (Turnbull, 1998). Sagbas dan Saruc (2004)**,** mengemukakan dua teori utama mengenai sumber munculnya *flypaper effect* yang sering digunakan yaitu *fiscal illusion* dan *the bureaucratic model*.

2.1 *Fiscal Illusion*

Fiscal illusion pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Italia bernama Amilcare Puviani yang menggambarkan terjadinya ilusi fiskal pada saat pembuat keputusan memiliki kewenangan dalam suatu institusi sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Dalam arti lain, Ilusi fiskal mengemukakan bahwa *flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut. Pemerintah sebenarnya menghasilkan output yang diminta oleh masyarakat, tetapi permintaan masyarakat untuk barang publik didasarkan pada kesalahan persepsi tentang bagaimana pembiayaan barang publik dan pembagian biaya yang ditanggung masyarakat. Dengan kata lain masyarakat daerah memang melihat hasil ouput yang sebenarnya dari pengeluaran pemerintah terhadap barang publik dan manfaat yang diperoleh namun mempunyai persepsi yang

salah. Ilusi fiskal terjadi karena pendapatan pemerintah tidak sepenuhnya transparan atau tidak sepenuhnya dirasakan oleh pembayar pajak; maka biaya pemerintah dipandang lebih rendah dari yang sebenarnya.

2.2 *The Bureaucratic Model*

Pada model *the bureaucratic* (birokrasi), *flypaper effect* adalah hasil dari perilaku asimetris birokrat atau politisi dalam memaksimalkan anggaran, dengan lebih mudah menghabiskan dana transfer daripada meminta kenaikan pajak. *Flypaper effect* terjadi dikarenakan kekuasaan birokrat dan pengetahuan akan tranfer dan anggaran pemerintah. Niskanen (dalam Kang dan Setyawan, 2012) mengatakan para birokrat memiliki posisi yang kuat dalam mengambil keputusan publik. Birokrat akan berperilaku memaksimalkan anggaran sebagai bentuk dari kekuasaan mereka. Secara implisit, *the bureaucratic model* mendukung terjadinya *flypaper effect* sebagai konsekuensi dari perilaku birokrat yang menghabiskan dana transfer daripada menaikkan pajak, dikarenakan kenaikan pajak dianggap program yang tidak populer di mata masyarakat.

3. Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka biaya yang dikeluarkan tersebut dicerminkan pada pengeluaran

pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993). Pengeluaran pemerintah memiliki dasar teori dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu Y = C + I + G + (X-M). Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa penurunan dan kenaikan pengeluaran pemerintah akan menurunkan dan menaikan pendapatan nasional. Teori pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori mikro dan makro.

3.1 Teori Mikro

Teori mikro pengeluaran pemerintah adalah menganalisis faktor yang menimbulkan permintaan barang publik dan mempengaruhi tersedianya barang publik. Basri (dalam Azwar, 2016) menyatakan bahwa Interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan jumlah barang publik yang disediakan melalui anggaran belanja. Rumusan teori mikroberdarkan penentuan permintaan, sebagai berikut :

$$Ui = f(G, X)$$

di mana :

G = vektor dari barang publik

X = vektor dari barang swasta

i = individu; i = 1,…, m

U = fungsi utilitas

Mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu (Mangkoesoebroto, 1993):

a. Perubahan permintaan barang publik;
b. Perubahan kualitas barang publik;
c. Perubahan harga faktor produksi;

d. Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan juga kombinasi faktor produksi dalam proses produksi;

3.2 Teori Makro

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah tergolong menjadi tiga (Mangkoesoebroto,1993) :

3.2.1 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dengan menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi yang terdiri dari tahap awal, menengah dan lanjutan. Pada tahap awal, persentase investasi pemerintah relatif besar karena pemerintah harus menyediakan prasarana seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Tahap menengah pembangunan ekonomi, tetap diperlukannya investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diikuti dengan peranan investasi swasta yang semakin besar. Peran pemerintah tetap diperlukan pada tahap ini karena peran swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan pemerintah harus menyediakan barang-barang publik. Perkembangan ekonomi pada tahap ini menyebabkan hubungan antarsektor semakin rumit. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, presentasi investasi swasta terhadap PDB semakin besar dibandingkan dengan persentase investasi

pemerintah. Pada tahap ekonomi lanjut, Rostow menjelaskan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran sosial seperti program jaminan kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan.

3.2.2 Hukum Wagner

Wagner menjelaskan teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap PDB. Wagner berpendapat bahwa dalam suatu perekonomian jika pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran pemerintah relatif akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan *"The Law of Expanding State Expenditure"*. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jepang, Jerman). Wagner menerangkan peranan pemerintah akan semakin besar terutama disebabkan untuk mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan Hukum Wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada teori mengenai pemilihan barang public melainkan didasarkan dari teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang dapat bertindak bebas, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

3.2.3 Teori Peacock Dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori terbaik mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori ini

didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah selalu berupaya memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak ingin membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang besar. Teori ini merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan sejumlah dana untuk membiayai aktivitas pemerintahan sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman yaitu perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak semakin besar walaupun tarif pajak tetap, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah semakin besar begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalkan terjadinya peperangan maka pemerintah perlu memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dengan cara

menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect)* yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak hanya dibiayai dari pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke luar negara. Akibatnya setelah perang sebenarnya pemerintah dapat menurunkan tarif pajak kembali, namun tidak dilakukan karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Sehingga pengeluaran pemerintah meningkat karena PDB yang juga meningkat. Pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang disebut dengan efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang semula dilaksanakan oleh swasta dialihkan ke tangan pemerintah disebut efek konsentrasi (*concentration effect*). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah. Setelah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan kembali turun.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Peacock dan Wiseman tidak berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Bird mengkritik hipotesis yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke

pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang. Hal yang perlu dicacat dari teori Peacock dan Wiseman adalah mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan sebesar 25% dari pendapatan nasional. Apabila melampaui limit maka menyebabkan inflasi dan gangguan lainnya.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah memiliki potensi untuk menghasilkan *income* dan digunakan dalam menjalankan roda perekonomiannya. *Income* disebut juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan paling terpenting bagi daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerahnya. PAD adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan dalam membiayai kegiatan daerah bersangkutan (BPS, 2019). PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai perwujudan desentralisasi. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat

memanfaatkan potensi yang dimiliki secara optimal. PAD juga menjadi alat ukur dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Sumber-sumber PAD, antara lain:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kemenkeu, 2020). Pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur *(regulatory)*, penerimaan *(budgetory)*, redistribusi *(redistributive)*, dan alokasi sumber daya *(resource allocation)* maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian.

b. Retribusi Daerah

Sumber kedua untuk PAD berasal dari retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Kemenkeu, 2020). Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN atau BUMD. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik dan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut. Bersumber dari bagian laba perusahaan daerah, lembaga keuangan bank, penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara yang wajar. lain-lain PAD yang sah meliputi:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
c. Jasa giro;
d. Pendapatan bunga;
e. Tuntutan ganti rugi;
f. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang; dan
g. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

5. Transfer Tanpa Syarat (*Unconditional Grant*)

Transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *unconditional grant* dan *conditional grant*. Menurut PAU (2000), *unconditional grant* merupakan transfer kepada pemerintah daerah yang tidak disertai ikatan atau syarat tertentu dalam arti daerah dapat menggunakan atau mengalokasikannya kepada penggunaan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan. *Unconditional grant* bertujuan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah, sehingga setiap daerah dapat menjalankan urusan daerahnya sendiri pada tingkat yang layak. Dana transfer yang temasuk kedalam *unconditional grant*, yaitu :

5.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah sumber pembiayaan pusat yang diberikan kepada setiap daerah otonom (kabupaten/kota) bersumber dari pendapatan APBN, untuk dialokasikan dengan tujuan agar terjadinya pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan kepada seluruh kabupaten/kota dengan besaran sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto sesuai dengan imbangan kewenangan setiap daerah. Bersumber dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, diketahui formulasi DAU sebagai berikut :

$$DAU = AD + CF$$

dimana :

AD = Alokasi dasar; gaji PNS daerah

CF = Celah fiskal; kebutuhan fiskal – kapasitas fiskal

Perhitungan dana alokasi umum menggunakan metode Alokasi Dasar (AD) ditambah dengan Celah Fiskal (CF). Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji pegawai negeri sipil daerah tahun sebelumnya yang meliputi gaji pokok ditambah tunjangan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF. Komponen kebutuhan fiskal yang digunakan dalam pendekatan perhitungan terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Komponen kapasitas fiskal bersumber dari pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

5.2 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*. Penyaluran DBH dilakukan dengan prinsip *Based on Actual Revenue,* yaitu penyaluran DBH berdasarkan

realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Jenis-jenis DBH meliputi :

1. DBH Pajak

   DBH pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) dan cukai hasil tembakau.

2. DBH Sumber Daya Alam (SDA)

   DBH SDA meliputi mineral dan batu bara, kehutanan, minyak bumi dan gas bumi, pengusahaan panas bumi dan perikanan.

Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), meliputi DBH pajak bumi dan bangunan dan pajak penghasilan dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan DBH cukai hasil tembakau dan DBH sumber daya alam dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang sudah ditetapkan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Judul Penelitian	Alat dan Model Analisis	Hasil Penelitian
Fitri Amalia (2017)	*Flypaper Effect Of Regional Expenditures and It's Impact To Regional Inequality in*	$BD_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 DAU_{it} + \alpha_3 D + \varepsilon_{it}$…… (1) $KD_{it} = \beta_0 + \beta_1 BD_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 D + \varepsilon_{it}$ ……..(2)	DAU terhadap BD lebih signifikan dibanding respon PAD terhadap BD baik di Indonesia timur maupun barat. Adanya *flypaper effect*

	Indonesia	*Where*: BD =*regional expenditure* PAD = *own source revenue*; DAU = *general allocation fund;* *KD is regional gap* D = *dummy region, which 0 is non Java and 1 is Java.*	menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengandalkan pendapatannya dari transfer pemerintah pusat.
Younguck Kang, dan Dhani Setyawan (2012)	*Intergovernmental Transfer And The Flypaper Effect – Evidence from Municipalities /Regencies in Indonesia –*	$Y_t = \beta_0+\beta_1 X_{1i} +C X_{2i} + \varepsilon$ *Where*: Y_t : *expenditures (Locexpt)* β_0 : *Constant* β_1, β_2 : *Regression Coefficient* X_{1i} : *Total Transt (Transt-1)* X_{2i}:*Ownrevt (Ownrevt-1)* ε: *Error term*	Pengaruh PAD terhadap BD lebih kuat daripada efek *Balance Fund*. Ini membuktikan tidak terjadinya *flypaper effect* di respon pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Ade Septiano Herlambang (2018)	Analisis Fenomena *Flypaper Effect* Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006 – 2015	$BP_{it} = \beta_{0i} +\beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \varepsilon_{it}$ Dimana : BP_{it} = Belanja Pegawai PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah DAU_{it} = Dana Alokasi Umum i= kab/kota di Prov. Lampung t = Tahun	Pada kab/kota di provinsi Lampung terdeteksi adanya fenomena *flypaper effect*. Hal ini menjelaskan bahwa pada kab/kota di provinsi Lampung masih terdapat ketergantungan pada penggunaan dana alokasi umum untuk membiayai alokasi belanja pegawai.
Citra Kartika Buana, dan Bambang Jatmiko (2017)	Analisis faktor –faktor yang mempengaru-hi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah (studi empiris pada	$BD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \varepsilon_i$ Dimana : BD = belanja daerah PAD = Pendapatan Asli Daerah	kedua variabel tersebut menunjukkan adanya *flypaper effect* terhadap belanja daerah.

	pemerintahan kab/kota di DIY 2010-2016)	DAU = Dana Alokasi Umum DBH = Dana Bagi Hasil	
Imam Santoso, I Wayan Suparta, Saimul (2015)	*Flypaper Effect* Pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung	$LnBD_{it}=b_o+b_1LnPAD_{it}+b_2LnDBH_{it}+b_3LnDAU_{it}+b_4 LnPDK_{it}+b_5 D_{it}+u_{it}$ Dimana : BD = Belanja daerah PAD = pendapatan asli daerah DBH = dana bagi hasil DAU = dana alokasi umum PDK = jumlah penduduk	Hasil menunjukkan koefisien DAU lebih besar dari PAD dan keduanya signifikan artinya telah terjadi *flypaper effect.* Fenomena *flypaper effect* tidak membedakan antara kab/kota dengan derajat otonomi fiskal rendah atau tinggi.
Afrizawa-ti (2011)	Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan	$BDit = a + b1\ DAUit + b2\ PADit + \varepsilon$ Dimana: BD_{it} = Jumlah Belanja Daerah DAU_{it} = Jumlah DAU kab i, tahun t PAD_{it} = Jumlah kab i, tahun t e = *error term*	Hasil pengujian menunjukkan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, yang artinya terjadi *flypaper effect.*
Muhamad Armawa-ddin, Wali Aya Rumbia, Muham-mad Nur Afiat (2017)	*Flypaper Effect Analysis of District and City Regionally Spending in Sulawesi*	$BELANJA_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \mu_{it}$ Dimana : Belanja: Belanja Daerah PAD: Pendapatan Asli Daerah DAU: Dana Alokasi Umum DAK: Dana Alokasi Khusus DBH : Dana Bagi Hasil.	Menggunakan model regresi parsial, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Sulawesi yang bersumber dari DBH dan DAU, sedangkan yang bersumber dari DAK tidak terdeteksi adanya gejala *flypaper effect.*

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua variabel *independent*, yaitu PAD dan UCG (DAU dan DBH), dengan satu variabel *dependent* yaitu Belanja Daerah. Dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaannya sendiri yang berasal dari PAD, serta bantuan dana oleh pemerintah pusat berupa dana perimbangan guna menutupi *fiscal gap*.

Semakin besar transfer yang diberikan mengindikasikan bahwa daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah transfer yang diberikan mengindikasikan bahwa daerah tidak bergantung terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan meneliti ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berikut merupakan kerangka konseptual.

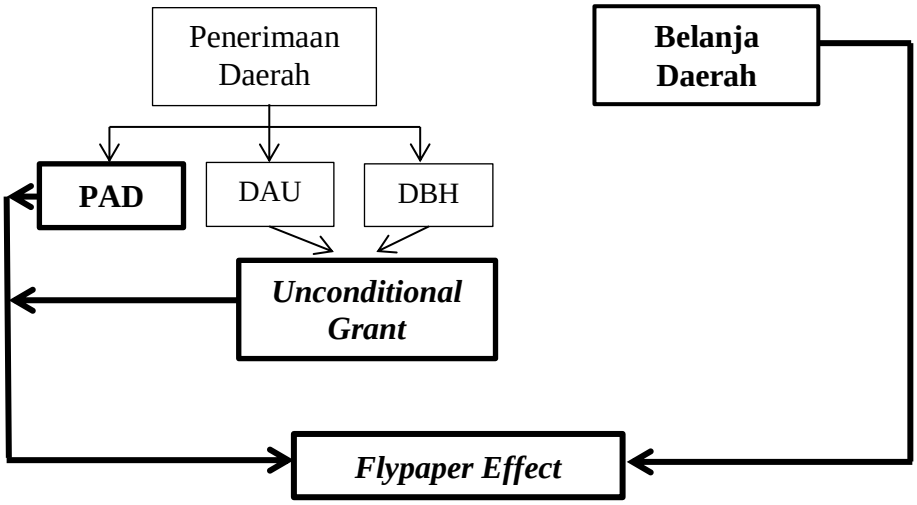

Gambar 3. Skema kerangka pemikiran

D. Hipotesis

1. Diduga telah terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah provinsi-provinsi di Sumatera.
2. Diduga provinsi dengan PAD rendah mengalami *flypaper effect*.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode data panel, yang merupakan gabungan dari data *time series* dari tahun 2010 sampai 2019, dan *cross section* yang terdiri dari 10 provinsi di Sumatera. Provinsi-provinsi di Sumatera yang meliputi; Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel *independent* yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Unconditional Grant* (UCG) dengan 1 (satu) variabel *dependent* yaitu Belanja Daerah (G). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung atau berasal dari pihak ketiga. Sumber data yang digunakan diperoleh dari publikasi situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (*djpk.kemenkeu.go.id*) dan Badan Pusat Statistik (*bps.go.id*), antara lain :

1. Belanja daerah provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2010-2019.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2010-2019.
3. *Unconditional Grant* (UCG), terdiri dari DAU dan DBH provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2010-2019.

4. Total pendapatan provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2010-2019.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional digunakan untuk mengukur variabel yang akan digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Belanja Daerah (G), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan *Unconditional Grant* (UCG).

Tabel 5. Variabel dalam Penelitian

Nama Data	Simbol	Satuan	Sumber Data
Belanja Daerah	G	Juta Rupiah	DJPK, BPS
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Persen	DJPK, BPS
Unconditional Grant	UCG	Persen	DJPK, BPS

Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dalam rangka pengujian hipotesis, maka dikemukakan definisi variabel yang digunakan sebagai berikut :

1. Belanja Daerah

Penelitian ini menggunakan belanja daerah sebagai variabel *dependent*. Belanja daerah adalah semua kewajiban daaerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi

hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pada penelitian ini, menggunakan data belanja daerah dalam juta rupiah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel *independent*. yaitu salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah pusat semakin kecil dalam hal ini transfer dana ke daerah (Badan Pusat Statistik, 2020). Pada penelitian ini, menggunakan data persentase (%) PAD terhadap total pendapatan.

3. *Unconditional Grant*

Menurut BPPK, transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu transfer tanpa syarat (*unconditional grant*) dan transfer dengan syarat (*conditional grant*). *Unconditional grant* merupakan variabel *independent*, yaitu transfer pemerintah pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). *Unconditional grant* ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antardaerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang

layak. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horisontal (*horizontal equalization*). Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri (Brojonegoro dan Vazquez, 2002). Pada penelitian ini, menggunakan data persentase (%) UCG terhadap total pendapatan.

C. Metode Analisis

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Secara spesifik, teknik analisis tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dalam hal ini menggambarkan variabel dalam penelitian ini meliputi variabel *dependent* dan *independent*. Deskriptif dari suatu data dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum variabel. Pengujian ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model yang telah dibuat tidak menyimpang dari asumsi-asumsi klasik, mendeteksi asumsi klasik untuk panel terdiri

dari tiga pengujian, antara lain:

2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dideteksi dengan metode *Jarque-Bera* (JB). Uji statistik dari *Jarque-Bera* (JB) menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis. Formula uji statistik *Jarque-Bera* (JB) sebagai berikut :

$$\text{JB} = \text{n}\left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24}\right]$$

Dimana :

S = koefisien skewness

K = koefisien kurtosis

Jika residual terdistribusi secara normal, nilai statistik *Jarque-Bera* (JB) akan sama dengan nol. Nilai statistik JB didasari pada *Chi Squares* dan derajat kebebasan (df) = 2. Jika H_0 diterima artinya residunya tersebar secara normal. Sedangkan, jika H_0 ditolak artinya residu tidak tersebar secara normal.

2.2 Deteksi Multikolonieritas

Langkah selanjutnya adalah menyadari bahwa ada multikolinieritas dalam setiap persamaan. Multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel *independent* di dalam regresi berganda. Hubungan linier dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna (*perfect*) dan kurang sempurna (*imperfect*). Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah multikolinieritas dalam suatu model regresi. Tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan metode korelasi parsial antar variabel *independent*.

Menurut Studenmund (2016), menyatakan bahwa beberapa ahli memiliki angka yang berubah-ubah sebagai batasan terjadinya multikolinieritas yaitu 0,80. Sedangkan menurut Widarjono (2018), menyatakan bahwa jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka diduga terjadi multikolinieritas dalam persamaan, sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka diduga model tidak mengandung multikolinieritas.

3. Analisis Estimasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* maka hubungan fungsional dinyatakan sebagai berikut:

$$G = f(PAD, UCG)$$

Penelitian ini dilakukan dengan model panel data untuk menyelidiki terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah. untuk menghindari data yang ekstrim, maka penelitian ini menggunakan model regresi berganda semilog (log-linier) dengan persamaan regresi, sebagai berikut:

$$LnG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 UCG_{it} + \mu_{it}$$

Dimana:

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

G = Belanja Daerah provinsi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

UCG = *Unconditional Grant* (DAU dan DBH)

it = provinsi, tahun

μ = galat atau *Error Term*

Untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *flypaper effect*, jika koefisien UCG > koefisien PAD atau dapat di fungsikan jika $b_1 > b_2$ berarti $\frac{b1}{b2} > 1$, maka terjadi *flypaper Effect* (Tresch, 2002). Menurut Widarjono (2018), Beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi regresi model data panel untuk mengetahui koefisien PAD, dan UCG. Tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu metode *common effect*, metode *fixed effect* dan metode *random effect*.

3.1 *Metode Common Effect* (CEM)

Metode ini adalah metode paling sederhana yang digunakan untuk mengestimasi data panel dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Model CEM mengasumsikan bahwa intersep dan slope dari persamaan regresi dianggap konstan. Metode ini menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengestimasi model panel. Persamaan regresi sebagai berikut :

$$\mathrm{LnG}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{PAD}_{\mathrm{it}} + \beta_2 \mathrm{UCG}_{\mathrm{it}} + \mu_{\mathrm{it}}$$

3.2 *Metode Fixed Effect* (FEM)

Metode *fixed effect* adalah metode mengestimasi data panel dengan menggunaan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. *Fixed effect* didasarkan adanya perbedaan intersep antar individu namun intersepnya sama antar waktu. Model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope)* tetap antar objek dan waktu. Model estimasi ini menggunakan teknik *Least Squares Dummy*

Variables (LSDV) yang ditulis sebagai berikut :

$$LnG_{it} = \beta_0 + \alpha_{it}D + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 UCG_{it} + \mu_{it}$$

dengan D = [d1, d2, . . . , di] adalah variabel *dummy*.

3.3 *Metode Random Effect* (REM)

Variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan yang akan mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan metode *random effect*. *Random effect* mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar individu dan antar waktu. Metode yang digunakan untuk mengestimasi model ini adalah *Generalized Least Squares* (GLS). Menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$LnG_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 UCG_{it} + \mu_{it}$$

4. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Dalam pembahasan teknik estimasi model regresi data panel, ada tiga teknik yang bisa digunakan yaitu dengan metode *common effect, fixed effect,* dan *random effect.* Maka, terlebih dahulu perlu menentukan model data panel mana yang akan digunakan dan paling tepat untuk mengintepretasi hasil penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan uji *chow* untuk menentukkan antara metode CEM dan FEM, uji LM digunakan untuk menentukan antara metode CEM dan REM, dan uji Hausman untuk menentukan antara metode FEM dan REM.

4.1 Uji *Chow*

Setelah melakukan regresi dua model yaitu model dengan asumsi bahwa slope dan intersep sama (*common effect model*) dan model dengan asumsi bahwa slope sama tetapi beda intersep (*fixed effect model)*, pertanyaan yang muncul adalah model mana yang lebih baik digunakan? Apakah menggunakan *common effect model* atau *fixed effect model*. Uji *chow* digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Caranya dengan melihat nilai koefisien determinasi maupun nilai statistik dari Durbin Watson.

$$\text{Chow} = \frac{SSR_R - SSR_{U/q}}{SSR_u/(n-k)}$$

Dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Metode *Common Effect* …….. H_0 Diterima

H_a : Metode *Fixed Effect* ……. H_0 Ditolak

4.2 Uji *Lagrange Multiplier (LM)*

Untuk mengetahui apakah metode *random effect* lebih baik dari metode *common effect* digunakan Uji *Lagrange Multiplier (LM).* Uji signifikansi *random effect mode* dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Adapun formula nilai statistik LM dihitung, sebagai berikut :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(\sum_{t=1}^{T}\hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{T}\hat{e}_{it}^{\,2}} - 1\right)^2$$

$$= \frac{nT}{2(T-1)}\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(T\widehat{e_{it}})^2}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{t=1}^{T}\hat{e}_{it}^{\,2}} - 1\right)^2$$

Dimana n = jumlah individu; F= jumlah periode waktu dan ê adalah

residual metode OLS. Uji LM didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sejumlah variabel *independent* yang akan diteliti. Jika nilai statistik LM lebih besar dari nilai kritis dari *chi squares* maka menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *random effect* dari pada metode *common effect*. Sebaliknya, jika nilai statistik LM lebih kecil dari nilai *chi-square* sebagai nilai kritis maka menerima hipotesis nol. Estimasi *random effect* dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data panel, tetapi menggunakan metode OLS. Dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Metode *Common Effect* …….. H_0 Diterima

H_a : Metode *Random Effect* ..……. H_0 Ditolak

4.3 Uji *Hausman*

Uji secara formal dikembangkan oleh Hausman. Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih antara menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*. Uji Hausman didasarkan bahwa metode OLS dan GLS konsisten tetapi OLS tidak efisien didalam hipotesis nol. Uji Hausman mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel *independent*. Jika kita menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect*, sebaliknya jika gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai kritisnya lebih besar dari nilai statistik Hausman maka model yang tepat digunakan adalah

model *random effect*. Dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Metode *Random Effect* …….. H_0 Diterima

H_a : Metode *Fixed Effect* ..……. H_0 Ditolak

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa baik garis regresi ynag menjelaskan data (*goodness of fit*). Jika semua data terletak pada garis regresi atau nilai residual adalah nol maka mempunyai garis regresi yang sempurna. Tetapi pada umumnya yang terjadi adalah $\hat{e}_i$ bisa positif atau negatif. Namun yang kita harapkan adalah mencoba mendapatkan garis regresi yang menyebabkan $\hat{e}_i$ sekecil mungkin. R^2 didefinisikan sebagai proporsi atau persentase dari total variasi variabel *dependent* Y. Jika regresi tepat pada semua data maka R^2 =1, sedangkan jika garis regresi tepat pada rata-rata nilai Y maka R^2 = 0. Dengan demikian, nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1.

$$0 \leq R^2 \leq 1$$

Semakin mendekati 1 artinya semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Semakin mendekati nol maka memiliki garis regresi yang kurang baik.

6. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Derajat Desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat dalam membiayai pembangunan daerahnya. Untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan dilakukan dengan menggunakan ukuran yang disebut dengan Derajat Desentralisasi

Fiskal (DFF) yang dikembangkan oleh Tim Litbang Kemendagri RI dengan Fisipol UGM (1991). Rasio derajat desentralisasi fiskal (DDF) dapat dirumuskan, sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Dimana :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPA_t = Total Pendapatan Daerah tahun t

Dengan menghitung rata-rata tertimbang masing-masing provinsi, dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 6 . kategori Provinsi Berdasarkan Rasio DDF

Hasil Perhitungan	**Kategori**
Rasio DDF > rata-rata	Provinsi dengan PAD tinggi
Rasio DDF < rata-rata	Provinsi dengan PAD rendah

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah di provinsi-provinsi di Sumatera dalam kurun waktu 2010-2019. Hal ini menandakan bahwa provinsi-provinsi di Sumatera masih belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal dan pembiayaan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat.
2. Fenomena *Flypaper Effect* terjadi pada provinsi-provinsi dengan PAD yang rendah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan kepada pemerintah, sebagai berikut :

1. Untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pendapatan pada pusat, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi daerahnya dengan melakukan: 1) intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, 2) memberikan *reward* dan *punishment* secara objektif kepada daerah maupun Organisasi Perangkat Desa (OPD) atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, 3) melakukan investasi maupun kerjasama, dan 5)

menerapkan teknologi guna mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak.

2. Sumber pajak utama yang paling produktif ditarik oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat membatasi anggaran pemerintah daerah untuk membiayai seluruh pengeluarannya khususnya daerah yang tidak memiliki sumber daya alam. Diperlukan perbaikan formulasi kebijakan pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi yang harmonis dengan pajak pusat agar dapat menjadi andalan pendapatan daerah.
3. Kualitas belanja pemerintah daerah masih kurang bagus, setiap kebutuhan pembangunan penting lainnya pemerintah daerah menggantungkan pembiayaan APBD pada transfer dari pusat. Diharapkan adanya penetapan batas atas belanja pegawai dan batas minimum belanja modal.
4. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan analisis kinerja salah satunya dengan *Balance Scorecard*, analisis kinerja pengukuran dari segi keuangan, operasi internal, perspektif konsumen serta inovasi. Sehingga perusahaan terus berkembang mengikuti kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kebijakan yang kondusif untuk pengembangan perusahaan menjadi perusahaan yang profesional, dan secara operasional melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan yang mampu mendorong daya saing.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Afrizawati. (2011). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. Vol.10 no.1.

Amalia, F. (2017). Flypaper Effect of Regional Expenditures and It's Impact to Regioal Inequality in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 6 (1) Page 125 - 138.

Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Flypaper Effect Analysis of District and City Regionally Spending in Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 18 No. 1 : 77–91.

Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, Vol. 20 No. 2.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota* Jakarta: Subdirektorat Statistik Keuangan.

Brodjonegoro, B., & Vazquez, J. M. (2002). An Analysis Of Indonesia's Transfer System:Recent Performance and Future Prospects.

Bougie, U. S. (2016). *Research Methods For Business : a skill building approach.* United Kingdom: WILEY.

Buana, C. K., & Jatmiko, B. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten & Kota di DIY 2010-2016). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1 No. 2, Hlm: 121-130.

(n.d.). *Data per Daerah 1998-2002.* Jakarta: Kementrian Keuangan.

Djayasinga, M. (2015). *Membedah APBD.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gorodnichenko, Y. (2011). Effects of Intergovernmental Transfer and the Flypaper effect in Turkey. *Turquoise Studies.*

Gujarati, D. N. (n.d.). *Basic Econometrics, Fourth Edition.*

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Herlambang, A. S. (2018). *Analisis Fenomena Flypaper Effect Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2006 – 2015.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Inman, R. P. (2008). The Flypaper Effect. *National Bureau of Economic Research (NBER)Working Paper No. 14579*, JEL No. H72,H77,P16.

Iskandar, I. (2012). Flypaper Effect Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, Nomor 1, hlm.113-131.

Kang, Y., & Setyawan, D. (2012). Intergovernmental Transfer And The Flypaper Effect – Evidence from Municipalities/Regencies in Indonesia –. *KDI School Working Paper Series*, 12-06.

Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik.* Malang: UB Press.

Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia (JAAI),* Volume 11 No.1;l 67–80.

Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.

Mangkoesoeboto, G. (1993). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga.* Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.

Ndadari, l. w., & adi, p. h. (2006). Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat. *The 2nd National Conference UKWMS.*

Nurhayati, D. S. (2018). Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. *Media Ekonomi*, Vol. 26 No. 2 : 111-120.

Paul N. Courant, E. M. (1979). *The Stimulative Effects of Intergovernmental Grants: Or Why Money Sticks Where It Hits.* Washington, D.C: Coupe Papers On Public Economics.

Pettersson, K. (2020). The flypaper effect: A study of the flypaper effect in Swedish.

Pradipta, W. T., & Jatmiko, B. (2018). Pengaruh Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 2 No. 2, Hlm: 171-185.

Pramuka, B. A. (2010). Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Dearah di Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1, hlm.1-12.

Rahmatul Mulya, B. B. (2016). Pengaruh Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemeritah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.* Jakarta: Sekertariat Negara.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Sekertariat Negara.

Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.* Jakarta: Sekertariat Negara.

Sagbas, I., & Saruc, N. T. (2004). Intergovernmental Transfers And The Flypaper Effect in Turkey.

Santoso, I., Suparta, I. W., & Saimul. (2015). Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4 no-2.

Studenmund. (2016). *Using Econometrics A. Partical Guide, Seventh Edition.* Boston: PERSON.

Supranto, J. (2018). *Statistik Teori & Aplikasi, Edisi 8 Jilid 2.* Jakarta: Erlangga.

Tresch, R. (2002). *Public Finance A Normative Theory Third Edition.* Massachusetts: Department of Economics Boston College Chestnut Hill.

Turnbull, G. K. (1998). The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence. *Journal Of Urban Economics*, 1-26.

UGM, P. A. (2000). Laporan Akhir Kajian Profil Daerah Tingkat II Ditinjau dari Aspek Potensi Penerimaan Dearah kerjasama. *UGM*.

Universitas Lampung. (2017). *Format Penulisan Karya Ilmiah.* Lampung.

Widarjono, A. (2018). *EKONOMETRIKA, Edisi Kelima.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.bppk.kemenkeu.go.id

www.bps.go.id

www.djpk.kemenkeu.go.id